



PERUBAHAN RENJA



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 serta hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 Triwulan I.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2025, merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2025.

Berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain: penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan

demikian perencanaan konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif.

Berdasarkan ketentuan dan dinamika kondisi saat ini, maka Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan/penyesuaian. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sesuai dengan amanat Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD 2025 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan menjadi landasan dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, Dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025,

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2025.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja OPD adalah untuk :

- a. Mendiskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;
- b. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan

- program strategis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Demak;
- c. Sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing bidang/pelaku aktivitas;
 - d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta APBD Perubahan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
	Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Perubahan Renja PD
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025
	Menguraikan tentang kondisi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2025.
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
	Memuat tentang tujuan dan sasaran beserta target kinerja Perangkat Daerah
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
	Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2025 beserta kerangka pendanaannya.

BAB V

Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagai Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian selama tahun 2025 mengampu 5 program, 11 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

Pada tahun 2025 anggaran murni sebesar Rp11.667.458.020,00 setelah penyesuaian efisiensi belanja daerah menjadi Rp11.411.877.225,00 terdapat pengurangan sebesar Rp255.580.795,00 setelah perubahan terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp82.220.959,00 sehingga anggaran perubahan menjadi sebesar Rp11.494.098.184,00 anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Demak. Di triwulan 1 dari anggaran Rp11.411.877.225,00 terealisasi sebesar Rp1.569.998.763 dengan capaian 13,76% dan realisasi fisik sebesar 25,31%. Adapun realisasi capaian program/kegiatan sebagai berikut:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan:
 - 1) Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik terdapat 1 (satu) indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah tercapai 0%;
 - 2) Program pengelolaan aplikasi informatika dengan indikator Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah tercapai 0%;
 - 3) Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan indikator tingkat keamanan informasi pemerintah tercapai 0%;
 - 4) Jumlah Laporan Keuangan tercapai 77,05%;
 - 5) Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi tercapai 0%;

- 6) Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi tercapai 30,51%;
- 7) Jumlah BMD yang disediakan tercapai 0%;
- 8) Jasa penunjang urusan yang tersedia tercapai 60%;
- 9) Jumlah BMD yang terpelihara tercapai 21,95%;
- 10) Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi tercapai 0%;
- 11) Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata tercapai 0%;
- 12) Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tercapai 50%;
- 13) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tercapai 91,67%;
- 14) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tercapai 56%;
- 15) Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan tercapai 0%;
- 16) Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tercapai 0%;
- 17) Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tercapai 0%;
- 18) Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan tercapai 0%;
- 19) Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan tercapai 16,67%;
- 20) Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan tercapai 0%;
- 21) Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan tercapai 8,33%;
- 22) Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu tercapai 0%;
- 23) Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tercapai 53,33%;
- 24) Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD tercapai 0%;
- 25) Jumlah paket mebel yang disediakan tercapai 0%;
- 26) Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan tercapai 0%;

- 27) Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat tercapai 33,33%;
- 28) Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya tercapai 30,77%;
- 29) Jumlah mebel yang dipelihara tercapai 0%;
- 30) Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara tercapai 8,57%;
- 31) Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi tercapai 0%;
- 32) Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi tercapai 76,92%;
- 33) Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi tercapai 0%.
- 34) Jumlah komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo tercapai 0%;
- 35) Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan tercapai 0%;
- 36) Persentase khalayak yang terpapar informasi publik tercapai 53,48%;
- 37) Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis tercapai 75%;
- 38) Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda tercapai 0%;
- 39) Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah tercapai 25%;
- 40) Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas tercapai 0%;
- 41) Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat tercapai 73,53%;
- 42) Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata tercapai 0%;

- 43) Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah tercapai 0%;
 - 44) Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik tercapai 0%;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 2 (dua) indikator kinerja Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan tercapai 100% dan persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti tercapai 100%;
 - 2) Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan indikator tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi tercapai 100%;
 - 3) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah tercapai 100%;
 - 4) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD tercapai 100%;
 - 5) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tercapai 100%;
 - 6) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tercapai 100%;
 - 7) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya tercapai 100%;
 - 8) Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan tercapai 100%;
 - 9) Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota tercapai 100%;

- 10) Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo tercapai 100%;
 - 11) Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik tercapai 100%;
 - 12) Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi tercapai 100%;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
 - 1) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tercapai 150% dari target 2 dokumen terealisasi 3 dokumen capaian melebihi target karena di triwulan 1 ada efisiensi anggaran perjalanan dinas dan pergeseran anggaran, sehingga dokumen RKA-SKPD dapat terealisasi 3 dokumen.
 - 2) Jumlah Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Dikelola tercapai 120%, dari target 5 layanan dapat terealisasi 6 layanan, sehingga capaian melebihi target.
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan.
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Tingkat capaian target kinerja baru s.d triwulan I tahun 2025;
 - Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada triwulan II sampai dengan triwulan IV;
 - Perubahan pagu anggaran karena diusulkan pada pergeseran maupun perubahan anggaran;
 - Adanya peralihan mekanisme pengadaan dari ekatalog v.5 menjadi ekatalog v.6 dan Tisera.
 - b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Terpenuhinya ketersediaan anggaran;
 - Komitmen bersama untuk mencapai target yang telah ditentukan;

- Koordinasi dan komunikasi yang baik antar semua koordinator dan sekretariat.
- c. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Optimalisasi kegiatan komunikasi, informatika, statistik dan persandian dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada;
 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian dilakukan secara intensif;
 - Optimalisasi penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan dinas komunikasi dan informatika.
- 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dengan tingkat capaian program s.d triwulan I Tahun 2025 dari 5 (lima) program, dimana 2 (dua) program mencapai 100%, 2 (dua) program tingkat capaiannya belum diketahui disebabkan hasil penilaian keluar di akhir tahun atau awal tahun berikutnya. Dengan tingkat capaian kinerja ini maka implikasi yang timbul adalah tersedianya pedoman dalam perencanaan tahun depan.
- 6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - Perencanaan anggaran diharapkan lebih efisien dan efektif berdasarkan kinerja.
 - Optimalisasi komunikasi dan koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran dengan semua pihak yang terkait.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s.d triwulan I tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 TW 1
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Lembar :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subk egiatan	Target Renstra Perangka t Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisas i s/d Triwula n IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
					Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	84,04	83,90	84,04	n/a	n/a	84,04	84,04	100,00
					Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang Mencapai Target	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	16	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	31	33	10	10	100,00	16	49	158,06
2	16	01	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	11	2	1	50,00	3	14	175,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subk kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	8	2	3	150,00	5	13	216,67
2	1	0	2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	7	3	3	100,00	5	12	200,00
2	1	0	2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	1	0	0	0,00	0	1	50,00
2	1	0	2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	6	3	3	100,00	3	9	100,00
2	1	0	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	61	174	61	53	86,89	92	245	401,64
2	1	0	2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	33	36	33	91,67	45	45	125,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.02.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25	141	25	20	80,00	59	200	800,00
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	90,13	90,33	90,35	n/a	n/a	90,35	90.35	100,24
					Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	1	0		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100,00
2	1	0	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	1150	2190	240	0	0,00	286	2.476	215,30
2	1	0	2.05.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210	270	70	0	0,00	130	400	190,48
2	1	0	2.05.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210	170	70	0	0,00	56	226	107,62

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subk kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.05.0010	Sosialisasi peraturan Perundang-undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	490	3090	100	0	0,00	100	3190	651,02
2	1	0	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	219	371	60	18	30,00	93	464	211,87
2	1	0	2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	10	2	0	0,00	2	12	171,43
2	1	0	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	30	6	1	16,67	8	38	95,00
2	1	0	2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	10	2	0	0,00	4	14	140,00
2	1	0	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	27	43	12	1	8,33	12	55	203,70
2	1	0	2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13	15	6	0	0,00	6	21	161,54

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subk kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.06.0009	Penyelenggaraan Rpat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	257	30	16	53,33	60	317	264,17
2	1	0	2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	6	1	0	0,00	1	7	350,00
2	1	0	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	37	118	16	0	0,00	59	177	478,38
2	1	0	2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	1	0	0	0,00	4	5	83,33
2	1	0	2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	85	2	0	0,00	35	120	600,00
2	1	0	2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	32	14	0	0,00	20	52	650,00
2	1	0	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	28	26	10	6	60,00	12	38	135,71
2	1	0	2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	22	6	2	33,33	8	30	125,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	4	4	4	100,00	4	4	100,00
2	1	0	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	89	141	82	18	21,95	92	182	204,49
2	1	0	2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
2	1	0	2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	13	13	4	30,77	13	13	100,00
2	1	0	2.09.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	15	15	0	0,00	20	30	100,00
2	1	0	2.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	98	35	3	8,57	35	108	540,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subk kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	0	0,00	3	3	100,00
2	1	0	2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	10	13	10	76,92	18	25	125,00
2	1	0	2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	2	0	0,00	2	2	100,00
					Indeks SPBE	3,30	3,62	3,62	n/a	n/a	3,62	3,62	109,70
					Indeks tata kelola SPBE	3,15	3,20	3,25	n/a	n/a	3,25	3,25	103,17
2	1	0		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah	64,28	64,28	64,50	66,66	103,35	69,04	64,50	100,34
2	1	0	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang Telah Terintegrasi	19	41	2	0	0,00	2	43	36,84

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.02.0015	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	41	30	4	0	0,00	4	34	82,93
2	1	0	2.02.0018	Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	8	6	2	2	100,00	2	8	100,00
2	1	0	2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	8	6	40	10	25,00	40	46	575,00
2	1	0	2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	35	41	1	1	100,00	1	42	120,00
2	1	0	2.02.0026	Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	41	41	1	1	100,00	1	42	102,44

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subk kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	5	5	1	0	0,00	1	6	120,00
					Indeks Layanan SPBE	3,30	4,14	4,14	n/a	n/a	4,14	4,14	125,45
2	1	0		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	99,00	95,20	96,00	n/a	n/a	96,00	96,00	96,97
2	1	0	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola	5	5	5	3	60,00	6	5	100,00
2	1	0	2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4	6	2	0	0,00	2	8	200,00
2	1	0	2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	9	14	3	0	0,00	3	17	188,89
2	1	0	2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	6	8	25	13,37	53,48	25	33	550,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subk kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
								Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	12	18	4	3	75,00	4	22	183,33
2	2	0	2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	2	0	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah	Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata	900	1500	1400	0	0,00	1400	1350	150,00
2	2	0	2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	41	41	27	27	100,00	27	68	165,85
2	2	0	2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor	Jumlah Data Statistik Sektor Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	249	123	1500	1103	73,53	1500	1623	651,81
2	2	0	2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektor yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1000	1500	1400	0	0,00	1400	2900	290,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja s.d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2025	
1				2	3	4	5	Target Renja tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan 1 Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan I Tahun 2025	9	Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2025	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)
					Indeks Keamanan Informasi	3,00	2,50	2,50	n/a	n/a	2,50	2,50	83,00
2	2	0		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	87,5	76	87,5	n/a	n/a	87,5	87,5	82,00
2	2	0	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	4	5	1	1	100,00	1	6	150,00
2	2	0	2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	8	12	1	1	100,00	1	13	162,50
2	2	0	2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41	41	41	41	100,00	41	41	100,00

Tabel 2.2

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025

NO	Program Unggulan/ Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2024		2025 s.d Triwulan I						2026		Perkiraan realisasi s.d. 2026		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
2	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SMART CITY																	
a	Integrasi e-government	Jumlah kluster data yang terintegrasi	Kluster	-	9	9	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9	100.000.000	2-16.03.2.02.007
1	Integrasi aplikasi kluster Kesehatan	Jumlah Aplikasi dalam kluster kesehatan	Unit	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2-16.03.2.02.007
2	Integrasi aplikasi kluster Kondisi Makro	Jumlah Aplikasi dalam kluster ekonomi makro	Unit	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2-16.03.2.02.007
3	Integrasi aplikasi kluster Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi dalam kluster keuangan daerah	Unit	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2-16.03.2.02.007
4	Integrasi aplikasi kluster Kesejahteraan	Jumlah Aplikasi dalam kluster kesejahteraan	Unit	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2-16.03.2.02.007
5	Integrasi aplikasi kluster	Jumlah Aplikasi dalam kluster	Unit	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2-16.03.2.02.007

NO	Program Unggulan/ Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2024		2025 s.d Triwulan I						2026		Perkiraan realisasi s.d. 2026		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
	Ekonomi Wilayah	ekonomi wilayah																
6	Integrasi aplikasi kluster Pendidikan	Jumlah Aplikasi dalam kluster Pendidikan	Unit	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		2-16.03.2.02.007
7	Integrasi aplikasi kluster Perumahan	Jumlah Aplikasi dalam kluster Perumahan	Unit	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		2-16.03.2.02.007
8	Integrasi aplikasi kluster Infrastruktur	Jumlah Aplikasi dalam kluster Infrastruktur	Unit	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		2-16.03.2.02.007
9	Integrasi aplikasi kluster TIK	Jumlah Aplikasi dalam kluster TIK	Unit	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		2-16.03.2.02.007
b	Pengembangan single database (kebijakan satu data)	Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata	data	500	1.000	1500	339.651.989	1400	104.160.000	a/n	10.800.000	a/n	10,37	1.000	40.000.000	1500	370.635.714	2.20.02.2.01.01
1	Pengolahan data	Jumlah data dalam metadata yang dianalisis	data	-	1.000	1500	184.698.275	1400	31.860.000	0	0	0	0,00	1.000	20.000.000	1500	204.698.275	2.20.02.2.01.01
2	Pelatihan / Bimtek	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	orang	-	84	166	69.753.490	0	0	0	0	0	0	0	0	166	69.753.490	2.20.02.2.01.01

NO	Program Unggulan/ Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2024		2025 s.d Triwulan I						2026		Perkiraan realisasi s.d. 2026		Kode Subkegiatan
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11/9)	14=(12/10)	15	16	17=7+11+15	18=8+12+16	19
3	Penyusunan database sipd	Jumlah database yang disusun	data	-	1	1	56.586.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	56.586.000	2.20.02.2.01.01
4	peningkatan kapasitas admin database	Jumlah admin yang dilatih	orang	-	82	82	8.797.949	27	72.300.000	27	10.800.000	100	14,94	0	0	82	19.597.949	2.20.02.2.01.01
5	Pengembangan aplikasi satu database	jumlah aplikasi yang dikembangkan	aplikasi	-	1	1	19.816.275	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	2.20.02.2.01.01

Dari tabel diatas diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak pada Tahun 2025 melaksanakan 1 (satu) program prioritas sebagai berikut:

- a). Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis “Smart City”. Pada Implementasi ini dengan dukungan 2 kegiatan yaitu:
 1. Integrasi e-government dengan indikator Jumlah kluster data yang terintegrasi dari target 9 (sembilan) kegiatan tercapai 9 (sembilan) kegiatan atau 100%;
 2. Pengembangan *single database* (kebijakan satu data) dengan indikator jumlah data dalam satu data yang memiliki metadata dari target 1000 data sampai dengan tahun 2025 sudah terealisasi sebesar 1500 data dengan capaian 150%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang tidak termasuk didalam pelayanan dasar dalam standar pelayanan minimal.

Berdasarkan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak 2021-2026, Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, pada tahun 2023 terealisasi 90,26 dari target 90,11 atau 100,17%, pada 2024 terealisasi 90,33 dari target 90,30 atau 100,03. Pada triwulan I tahun 2025 belum terealisasi karena belum dilakukan survey kepuasan masyarakat, penilaian SKM dilakukan setiap semester, jadi nilainya baru muncul di semester 1.
2. Indikator kinerja Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti, pada tahun 2023 terealisasi 100% dari target 100% atau tercapai 100%, pada tahun 2024 terealisasi 100% dari target 100% dan pada tahun

- 2025 triwulan I terealisasi 100% dari target 100% atau tercapai 100%. Semua keluhan masyarakat telah ditindaklanjuti.
3. Indikator Kinerja nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak pada tahun 2023 realisasi 83,46 dari target 83,04 atau 100,51%, pada tahun 2024 terealisasi 83,90 dari target 83,54 atau tercapai 100,43%. Nilai triwulan I tahun 2025 belum ada nilainya, karena nilai SAKIP keluar di awal tahun berikutnya.
 4. Indikator Kinerja Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target pada tahun 2023 realisasi 100% dari target 100%, dan pada tahun 2024 realisasi 100% dari target 100%. Pada triwulan I tahun 2025 belum bisa dihitung nilainya karena ada beberapa indikator yang belum ada nilainya.
 5. Indikator Kinerja Indeks SPBE, pada tahun 2023 terealisasi 3,62 dari target 3,24 atau 111,73%, pada 2024 terealisasi 3,93 dari target 3,62 atau 108,56. Pada triwulan I tahun 2025 belum terealisasi karena Indeks SPBE keluar di awal tahun berikutnya.
 6. Indikator Kinerja Indeks Layanan SPBE, pada tahun 2023 terealisasi 4,14 dari target 3,85 atau 107,53%, pada 2024 terealisasi 4,51 dari target 4,14 atau 108,94. Pada triwulan I tahun 2025 belum terealisasi karena Indeks Layanan SPBE keluar di awal tahun berikutnya.
 7. Indikator Kinerja Indeks Keamanan Informasi, pada tahun 2023 terealisasi 2,50 dari target 2,20 atau 113,64%, pada 2024 terealisasi 3,00 dari target 2,50 atau 120,00. Pada triwulan I tahun 2025 belum terealisasi karena Indeks Keamanan Informasi keluar di akhir tahun.
 8. Indikator Kinerja Indeks Tata Kelola SPBE, pada tahun 2023 terealisasi 3,20 dari target 3,10 atau 103,23%, pada 2024 terealisasi 3,80 dari target 3,25 atau 116,92. Pada triwulan I tahun 2025 belum terealisasi karena Indeks Tata Kelola SPBE keluar di awal tahun berikutnya.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

NO	Indikator	IKU	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	V	-	-	90,11	90,12	90,13	90,14	90,33	n/a	90,35	90,14	Belum Tercapai
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	V	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	V	-	-	83,04	83,54	84,04	84,54	83,90	n/a	84,04	84,54	Belum Tercapai
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	V	-	-	100	100	100	100	100	n/a	100	100	Belum Tercapai
5	Indeks SPBE	V	-	-	3,24	3,24	3,30	3,30	3,93	n/a	3,98	3,30	Belum Tercapai
6	Indeks Layanan SPBE	V	-	-	3,15	3,15	3,30	3,30	4,51	n/a	4,55	3,30	Belum Tercapai
7	Indeks Keamanan Informasi	V	-	-	2,20	2,50	2,70	3,00	3,00	n/a	3,00	3,00	Belum Tercapai
8	Indeks tata kelola SPBE	V	-	-	3,10	3,10	3,15	3,15	3,80	n/a	3,85	3,15	Belum Tercapai
9	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		-	V	100	100	100	100	100	n/a	100	100	Belum Tercapai

NO	Indikator	IKU	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 TW I	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	-	V	59,52	64,28	69,04	73,80	13,33	n/a	69,04	73,80	Belum Tercapai
11	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten		-	V	94,23	96,12	98,04	100	100	n/a	98,04	100	Belum Tercapai
12	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	-	V	100	100	100	100	100	n/a	100	100	Belum Tercapai
13	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		-	V	100	100	100	100	100	n/a	100	100	Belum Tercapai
14	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	-	-	V	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
15	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	-	-	-	74,36	75,85	77,37	78,91	73,74	n/a	77,37	78,91	Belum Tercapai
16	Persentase rumah tangga dengan akses internet	-	-	-	67,59	69,34	71,09	72,84	n/a	n/a	71,09	72,84	Belum Tercapai

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak selama ini menunjukkan capaian yang cukup baik di beberapa aspek utama, khususnya dalam hal penyediaan layanan informasi publik, pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penyebaran informasi pembangunan daerah, serta fasilitasi layanan komunikasi publik. Hal ini tercermin dari meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), integrasi bertahap layanan aplikasi e-government, dan semakin luasnya jangkauan penyampaian informasi melalui media cetak, elektronik, dan digital.

Di sisi lain, hasil evaluasi dan umpan balik dari masyarakat serta audit internal menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hal kritis yang perlu mendapat perhatian serius untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depan. Hal-hal kritis tersebut antara lain:

- a. Tingkat keterpaduan aplikasi e-government yang belum optimal, masih terdapat silo antar aplikasi OPD sehingga belum seluruhnya terintegrasi dengan baik ke dalam satu portal layanan daerah.
- b. Kecepatan respon layanan informasi publik yang belum seragam, terutama pada layanan-layanan yang membutuhkan koordinasi lintas bidang dan lintas OPD.
- c. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga beban pelayanan sering tidak sebanding dengan kapasitas SDM yang tersedia.
- d. Keamanan informasi dan perlindungan data, yang menjadi tantangan semakin besar seiring meningkatnya digitalisasi layanan pemerintah daerah.
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat, yang masih perlu didorong lebih aktif dalam memanfaatkan dan memberikan

umpan balik terhadap layanan-layanan yang telah disediakan.

Upaya perbaikan secara berkelanjutan diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut, seperti melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur TIK, pembaruan regulasi internal, hingga penyusunan roadmap integrasi aplikasi berbasis prioritas layanan publik. Sinergi lintas perangkat daerah dan kemitraan dengan pihak ketiga juga perlu diperkuat untuk mendukung tercapainya pelayanan komunikasi dan informatika yang lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, masih ditemukan sejumlah permasalahan, yaitu:

- a) Belum optimalnya layanan dan jangkauan jaringan telekomunikasi
- b) Belum optimalnya integrasi aplikasi
- c) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah
- d) Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Demak
- e) Belum optimalnya keamanan informasi

Sehingga permasalahan-permasalahan di atas menimbulkan sejumlah hambatan-hambatan, diantaranya:

- a) Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Jumlah SDM teknis belum mencukupi dibandingkan dengan beban kerja pelayanan komunikasi dan informatika yang terus meningkat.
 - Kompetensi teknis SDM, terutama dalam bidang keamanan siber, pengelolaan data, dan pengembangan aplikasi, masih belum merata.
 - Mutasi dan rotasi pegawai kadang mengganggu kesinambungan program-program berbasis TIK yang

memerlukan keahlian khusus.

b) Hambatan Infrastruktur TIK

- Infrastruktur jaringan internet dan intranet pemerintah daerah belum menjangkau seluruh kecamatan/desa secara optimal.
- Kapasitas server, penyimpanan data, dan perangkat keamanan jaringan masih terbatas.
- Ketergantungan pada penyedia layanan pihak ketiga yang kadang tidak memenuhi SLA (service level agreement) dengan baik.

c) Hambatan Koordinasi Lintas OPD

- Kurangnya sinkronisasi data antar-OPD menyebabkan keterlambatan integrasi layanan berbasis elektronik.
- Rendahnya komitmen OPD lain untuk berbagi data terbuka dan memperbaharui data secara berkala.
- Ego sektoral dalam pengelolaan aplikasi masing-masing OPD yang belum terintegrasi ke dalam sistem terpadu.

d) Hambatan Regulasi dan Kebijakan

- Belum adanya regulasi daerah yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi dan tata kelola data elektronik.
- Kebijakan penganggaran untuk bidang TIK masih belum menjadi prioritas utama di tingkat daerah.
- Belum semua unit kerja memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang mendukung pelaksanaan SPBE.

e) Hambatan Partisipasi dan Literasi Masyarakat

- Rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan kurangnya pemanfaatan layanan daring yang sudah disediakan pemerintah.
- Tingginya penyebaran hoaks, berita bohong, dan informasi yang tidak valid di media sosial.
- Minimnya masukan dari masyarakat mengenai kebutuhan layanan informasi publik yang lebih inklusif.

f) Hambatan Keamanan Informasi

- Kesadaran ASN dan perangkat daerah lain terhadap pentingnya keamanan data dan informasi masih rendah.

- Belum optimalnya mekanisme deteksi dan respon terhadap insiden keamanan siber.
 - Ancaman serangan siber yang semakin kompleks dan canggih, namun kemampuan mitigasi masih terbatas.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Program Pemerintah Kabupaten Demak Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak sebagai salah satu perangkat daerah membantu Kepala Daerah terkait dengan Pelayanan di Bidang Komunikasi Dan Informatika, pada Misi 2 (Dua) “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang lebih Bersih, Efektif, Efisien, dan Akuntabel“ Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak, yang berpijak pada nilai keistimewaan dengan semangat “Terwujudnya masyarakat Demak yang agamis, lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis” dalam penyelenggaraan pembangunan kabupaten berupa kemauan kuat yang bersumber pada potensi daerah dan Letak Geografis yang strategis selain itu juga memiliki budaya religius untuk memakmurkan dan berwawasan lingkungan serta pada daya kreatif masyarakat.

Besarnya potensi tersebut Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak diharapkan mampu mencapai program baik nasional maupun internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

Dengan Kondisi yang ada pada saat ini maka harapan satu tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informasi
2. Meningkatnya sumber daya manusia yang profesional dan mandiri
3. Meningkatkan jangkauan pelayanan komunikasi, dan informatika sampai ke daerah /kelurahan yang terisolir.

4. Meningkatkan keamanan informasi agar tidak mudah di retas.

Prioritas yang ditempuh adalah dengan melakukan penajaman program dan kegiatan dalam rangka upaya mengatasi kendala komunikasi dan informatika di Kabupaten Demak. Adapun peluang untuk menangani kendala yang ada adalah :

1. Penambahan sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informatika;
 2. Peningkatan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.
 3. Kerjasama dengan BSSN mengenai CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi , Kedudukan , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2016 . Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentu ada kendala atau tantangan yang dihadapi dan untuk mengetahui hal tersebut perlu diadakan analisis terhadap keberadaan OPD itu sendiri

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dalam mengimplementasikan perannya sebagai pelaksana pengelolaan komunikasi dan informatika tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stakeholder baik itu OPD maupun lembaga lembaga Non Pemerintah, sehingga dapat diwujudkan pelayanan pengelolaan komunikasi dan informatika yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan.

Namun Demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang sedangkan disisi lain peluang

pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif .

Dalam rangka meningkatkan Peran Dinas Komunikasi Dan Informatika perlu disusun Strategi yang sesuai dengan Misi RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, serta berpedoman kepada Permendagri 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktor pendorong yang merupakan peluang/potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan tantangan dalam pencapaian visi dan misi dinas.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak adalah :

- a) Pertambahan penduduk dan perkembangan teknologi dan informasi
- b) Sarana dan prasarana komunikasi, informasi , statistik dan persandian yang masih kurang memadai.
- c) Kualitas SDM dalam bidang komunikasi dan informatika
- d) Masih adanya beberapa wilayah di kabupaten Demak yang belum terjangkau layanan dalam bidang komunikasi dan informasi.

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak adalah :

1. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagaimana dirubah Peraturan Bupati Demak nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
2. Makin terjangkaunya prasarana/utilitas pendukung ke seluruh wilayah kabupaten Demak
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar profesionalisme

4. Dukungan Dan Komitmen OPD Lain serta pihak legislatif untuk meningkatkan sarana prasarana Komunikasi Dan Informatika.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
Isu-isu strategis yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu:
 1. Belum optimalnya pengelolaan aplikasi informatika
 2. Belum optimalnya tata kelola infrastuktur TIK
 3. Terbatasnya SDM TIK
 4. Belum optimalnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah
 5. Belum optimalnya infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi
 6. Belum optimalnya layanan informasi dan komunikasi publik
 7. Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan
 8. Belum optimalnya pengelolaan aduan masyarakat
 9. Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral

Untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut diperlukan suatu formulasi berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, yaitu berupa:

- a. Penguatan Kualitas SDM TIK & Komunikasi Publik, dengan rekomendasi:
 - Merencanakan program *capacity building* SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan studi banding berbasis kebutuhan nyata
 - Menyusun roadmap kebutuhan SDM berbasis kompetensi dan pola mutasi ASN yang berkesinambungan
- b. Optimalisasi Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah, dengan rekomendasi:
 - Memprioritaskan alokasi anggaran untuk peningkatan jaringan intranet, kapasitas server, penyimpanan, dan

- backup data center
- Memperluas jangkauan akses internet di kecamatan dan desa untuk mendukung keterjangkauan layanan publik berbasis daring
- c. Peningkatan Integrasi Layanan Digital dan Data Pemerintah, dengan rekomendasi:
 - Merancang dan mengimplementasikan *one data – one service portal* daerah secara bertahap dengan SOP yang jelas.
 - Memperkuat koordinasi lintas-OPD untuk komitmen penyediaan dan pembaruan data berkala
- d. Penguatan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Perlindungan Data, dengan rekomendasi:
 - Membangun sistem monitoring dan respon insiden siber berbasis standar nasional
 - Sosialisasi budaya *cyber security awareness* bagi ASN & masyarakat, serta penyusunan kebijakan perlindungan data pribadi
- e. Peningkatan Literasi Digital dan Partisipasi Publik, dengan rekomendasi:
 - Menyelenggarakan program edukasi literasi digital di sekolah, komunitas, dan desa
 - Meningkatkan kualitas dan variasi kanal komunikasi publik pemerintah yang mudah diakses masyarakat (media sosial, website interaktif, call center)
- f. Penguatan Regulasi dan Kebijakan TIK Daerah, dengan rekomendasi:
 - Menyusun revisi/perbaiki regulasi daerah terkait SPBE, keterbukaan informasi, keamanan siber, dan perlindungan data
 - Mengintegrasikan prioritas TIK ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra OPD, RKPD)

2.3. Review terhadap Renja 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 telah memuat Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta mekanisme penulisan. Selain itu telah memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun 2025 dan capaian kinerja tahun 2025 triwulan 1 serta tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 disusun berdasarkan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta targetnya pada Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dengan rincian seperti berikut:

1. Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025 direncanakan 5 Program 11 (sebelas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, setelah dilakukan analisis kebutuhan berubah menjadi 5 Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan, ada penambahan 1 sub kegiatan yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Total pagu anggaran pada Renja tahun 2025 sebesar Rp10.569.776,00 Namun, pada proses penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 ada penambahan sebesar Rp1.599.592.125 sehingga pagu anggaran bertambah menjadi Rp11.494.098.184,00.
3. Perubahan target pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah, semula target 10 dokumen berubah menjadi 16 dokumen, yaitu pada sub kegiatan:
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen semula target 2 dokumen berubah menjadi 5 dokumen karena ada penambahan dokumen RKA Pergeseran sebanyak 3 dokumen.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen semula target 3 dokumen berubah menjadi 5 dokumen karena ada penambahan dokumen DPA Pergeseran sebanyak 2 dokumen

4. Perubahan target pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan semula target 65 dokumen berubah menjadi 104 dokumen yang terdapat pada 2 sub kegiatan:
 - b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN semula target 36 orang/bulan menjadi 45 orang/bulan.
 - c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN semula target 25 dokumen menjadi 59 dokumen.
5. Perubahan target pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi semula target 240 orang berubah menjadi 286 orang, yaitu pada sub kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan target semula 70 orang berubah menjadi 130 orang.
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan target semula 70 orang berubah menjadi 56 orang.
6. Perubahan target pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi semula target 59 paket berubah menjadi 93 paket yang tersebar pada target-target indikator di 3 sub kegiatan dari 3 indikator antara lain:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan semula target 6 paket berubah menjadi 8 paket
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan

- indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan semula 2 paket berubah menjadi 4 paket
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD indikator Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD semula target 30 laporan berubah menjadi 60 laporan
7. Ada perubahan target pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah BMD yang disediakan semula jumlah target 13 unit berubah menjadi 59 Unit, yaitu pada sub kegiatan:
- g) Bertambah sub kegiatan baru Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dengan target 4 unit
- h) Sub kegiatan pengadaan mebel semula target 7 unit berubah menjadi 35 unit
- i) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula target 6 unit menjadi 20 unit
8. Perubahan target pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia semula target 10 laporan berubah menjadi 12 laporan yaitu dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat semula target 6 laporan berubah menjadi 8 laporan.
9. Perubahan target Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah BMD yang terpelihara semula target 82 Unit berubah menjadi 92 unit yaitu pada sub kegiatan:
- a) Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan indikator Jumlah Mebel yang Dipelihara semula 15 Unit menjadi 20 Unit.
- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi semula target 13 unit berubah menjadi 18 unit.
10. Perubahan target pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda dengan indikator Jumlah laporan hasil

fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda target semula 1 laporan berubah menjadi 4 laporan.

11. Perubahan target pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai Kewenangan Dinas Kominfo dengan indikator Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo semula target 4 dokumen berubah menjadi 1 dokumen.

Berikut tabel review Penetapan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2025 dan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Renja Tahun 2025
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					10.569.776.600					11.494.098.184	1.599.592.125
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	7.817.976.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	8.153.900.479	
1).	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	10 Dokumen	25.338.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	16 Dokumen	25.338.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.052.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.052.500	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	7.190.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5 Dokumen	7.190.500	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	6.346.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	6.346.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	6.749.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	6.749.000	
2).	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan	61 Dokumen	5.259.776.560	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan	104 Dokumen	5.465.221.519	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ bulan	4.817.638.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ bulan	5.133.520.959	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen	442.138.560	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59 Dokumen	331.700.560	
3).	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	240 orang	506.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	286 orang	703.595.920	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	21.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	60.000.000	
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Demak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	185.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Demak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang	129.576.500	
3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	300.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	514.019.420	
4).	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	59 paket	197.532.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	93 paket	153.436.500	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Komponen Listrik InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.995.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Komponen Listrik InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.251.000	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	25.526.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	37.310.000	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	17.366.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	17.366.000	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Demak	Jumlah Paket Barang	12 Paket	16.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan	Kab. Demak	Jumlah Paket Barang	12 Paket	16.500.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Penggandaan		Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Demak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	10.180.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Demak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6.800.000	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	50.000.000	
7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	12.964.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.209.500	
5).	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang disediakan	12 Unit	70.600.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang disediakan	59 Unit	441.731.600	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Yang Disediakan	4 Unit	181.780.500	
2.	Pengadaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	92.051.100	
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	65.600.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	167.900.000	
6).	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	10 laporan	1.503.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	12 laporan	1.126.500.000	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	4.000.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.122.500.000	
7).	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang terpelihara	82 unit	255.730.040	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang terpelihara	92 unit	238.076.940	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	78.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	51.999.000	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	86.780.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	79.366.000	
3.	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	4.482.753	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5.378.138	
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	21.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	21.300.000	
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	27.432.508	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/	3 Unit	21.292.708	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Direhabilitasi			
6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13 Unit	21.950.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	18 Unit	25.000.000	
7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	14,834.779	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	33.741.094	
B.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	98,56 Angka	2.025.900.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	96 Angka	2.248.174.000	
1)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola	5 Layanan	2.025.900.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola	6 Layanan	2.248.174.000	
1.	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Demak	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	431.220.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Demak	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	1.018.820.000	
2.	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Demak	Jumlah permohonan Informasi Publik	3 Permohonan	343.490.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Demak	Jumlah permohonan Informasi Publik	3 Permohonan	138.285.600	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan					yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan			
3.	Diseminasi Informasi	Kab. Demak	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	25 persentase	436.030.000	Diseminasi Informasi	Kab. Demak	Persentase Khalayak yang terpapar informasi publik	25 Persentase	30.717.500	
4.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Demak	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	815.160.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Demak	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	1.060.350.900	
C. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah	69,04%	425.900.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah	69,04%	872.348.705	
1).	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi	2 unit	672.348.705	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi	2 unit	872.348.705	
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Kab. Demak	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 laporan	135.978.000	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Kab. Demak	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	4 laporan	35.290.000	
2.	Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Demak	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	40.000.000	Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Demak	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	23.650.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Demak	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	40 Aplikasi	85.040.000	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kab. Demak	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	40 Aplikasi	563.400.000	
4.	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Demak	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 unit	100.000.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Demak	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 unit	191.713.705	
5.	Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	4 Dokumen	15.060.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	10.120.000	
6.	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Demak	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program	49.822.000	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Demak	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen	48.175.000	
D.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Tingkat Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100%	142.130.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Tingkat Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100 %	128.440.000	
1).	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah		Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata	1400 Dokumen	142.130.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki	1400 Data	128.440.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/Kota							metadata			
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Demak	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	27 Orang	72.300.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kab. Demak	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	27 Orang	66.700.000	
2.	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Demak	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat	1500 Data	37.970.000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kab. Demak	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat	1500 Data	22.210.000	
3.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Demak	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1400 Dokumen	31.860.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kab. Demak	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1400 Dokumen	39.530.000	
E.	PROGRAM ENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Tingkat keamanan informasi pemerintah	87,50%	116.435.000	PROGRAM ENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Tingkat keamanan informasi pemerintah	87,5%	91.235.000	
1).	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	1 Laporan	116.435.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	1 Laporan	91.235.000	
1.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Demak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	1 Laporan	99.230.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Demak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	1 Laporan	58.704.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			dan Non Elektronik					Elektronik dan Non Elektronik			
2.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41 Perangkat Daerah	58.640.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41 Perangkat Daerah	32.531.000	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan dari usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renja 2025. Hal ini merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan komunikasi dan informasi, yang mendukung bidang urusan statistik dan persandian dapat mendukung semua program kegiatan yang ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Demak Tahun 2025.

Dinas Komunikasi dan informatika mendapatkan usulan Pokir dari DPRD Kabupaten Demak dan Atas rekomendasi dari BPK bahwa kegiatan advertorial menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga semua alokasi anggaran advertorial yang ada di OPD selain Dinas Komunikasi dan informatika agar dialihkan ke urusan komunikasi dan informatika sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk diakomodir dan dianggarkan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dan di perubahan renja tahun 2025 tidak ada tambahan usulan kegiatan.

Adapun rincian pokir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Demak Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Advertorial Media Online Tema Kesehatan	Kabupaten Demak	Jumlah tayang advertorial melalui media online	50 tayang	Diterima
2	Pekerjaan Advetorial Media Cetak Tema Kesehatan	Kabupaten Demak	Jumlah tayang advertorial media cetak (kolom khusus)	5 tayang	Diterima
3	Iklan Publikasi Media Cetak	Kabupaten Demak	Jumlah tayang advertorial melalui media cetak harian, mingguan dan kolom khusus	52 tayang	Diterima
4	Iklan Publikasi Media Cetak	Kabupaten Demak	Jumlah tayang advertorial melalui media cetak harian, mingguan dan kolom khusus	20 tayang	Diterima

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 disusun mengacu agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029. Selain juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 ini, mendorong kebutuhan digitalisasi pada berbagai bidang tidak terkecuali dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer. Penyelenggara pemerintahan, pelaku usaha, industri, perdagangan, keuangan, dan berbagai sektor lainnya terdesak untuk bertransformasi digital dalam bisnisnya agar dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun ke depan sedangkan Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkomdigi menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2025 – 2029 antara lain sebagai berikut :

1. Menyediakan konektivitas broadband inklusif, berkualitas, dan terjangkau;
2. Menyediakan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus;
3. Memastikan layanan publik Kemenkomdigi yang baik;
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari pengembangan ekosistem digital nasional;
5. Mendorong kecakapan digital masyarakat;

6. Mempercepat pemanfaatan teknologi untuk pemerintah digital yang terpadu;
7. Menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya;
8. Memastikan penyelenggaraan komunikasi publik yang efektif;
9. Mewujudkan transformasi internal manajemen adaptif dan resilien.

Melihat Rencana strategis Kementerian tersebut di atas, maka ada keselarasan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menetapkan program-programnya yang bermuara untuk Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas yakni program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, program pengelolaan aplikasi informatika, program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan program penyelenggaraan statistik sektoral.

Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029 mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Dengan 8 misi yang dikenal dengan *asta cita*, yang isinya yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi

dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak juga mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Digital sesuai dengan perannya, visinya yaitu “Transformasi Digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita” dengan misi yaitu:

1. Mempercepat tersedianya konektivitas digital yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau, termasuk ekosistem teknologi aman dan berkelanjutan
2. Menerapkan tata kelola digital yang selaras untuk kepentingan ekonomi nasional, kedaulatan dan kemandirian digital
3. Mengakselerasi adopsi digital di seluruh aspek yaitu pemerintah ekonomi dan masyarakat dengan kolaborasi pentahelix
4. Menyelenggarakan komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan informasi publik yang akuntabel dan terpercaya

Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak juga mengacu pada visi Provinsi Jawa Tengah yakni “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi yang selaras dari 6 misi yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah, yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Demak sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang urusan statistik dan bidang urusan persandian.

Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak; dan
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah

Sasaran:

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif;
3. Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Meningkatnya kualitas keamanan informasi; dan

5. Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan evaluasi Renja 2025 Triwulan 1 perlu dilakukan perubahan target agar tujuan dan sasaran dapat tercapai. Secara terperinci tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 2021-2026 dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Uraian	Indikator	Realisasi		TARGET		
		2024	2025 TW 1	RPJMD pada tahun 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025
Tujuan 1. Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,33	n/a	90,13	90,35	90,35
Sasaran 1.1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
Tujuan 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	83,90	n/a	84,04	84,04	84,04
Sasaran 2.1. Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	100	n/a	100	100	100
Tujuan 3. Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	3,93	n/a	3,30	3,65	3,98
Sasaran 3.1. Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE	4,51	n/a	3,30	4,20	4,55
Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	3,00	n/a	2,70	2,70	3,00
Sasaran 3.3. Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	3,80	n/a	3,15	3,33	3,85

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026.

1. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program, Kegiatan Dan Subkegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan sebagai bahan pertimbangan digunakan:

- a. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
- b. Visi, Misi dan program unggulan Bupati dan wakil Bupati terpilih yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Demak.
- c. Cascading Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak telah disesuaikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum di dalam Cascading Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026.

2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program Dan Kegiatan

Guna mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tersebut diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak pada Tahun 2025 melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan

Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian dengan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, dan di perubahan renja tahun 2025 bertambah 1 (satu) sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan jadi total sub kegiatan menjadi 43 (empat puluh tiga) dengan pagu anggaran sebesar Rp11.494.098.184,00. Sumber dana berasal dari DAU (Dana Alokasi Khusus sebesar Rp10.980.078.764,00 dan dari DBH CHT sebesar Rp514.019.420,00. Dan lokasi kegiatan semuanya di Kabupaten Demak.

Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- e) Fasilitas Kunjungan Tamu
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pengadaan Mebel
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Mebel
 - d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.
 - 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - b) Pelayanan Informasi Publik
 - c) Diseminasi Informasi
 - d) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan.
 - 1) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
 - b) Koordinasi Penyusunan dan/atau Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
 - c) Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
 - d) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - e) Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai Kewenangan Dinas Kominfo
 - f) Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.
 - 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - b) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
 - c) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.
 - 1) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- b) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel rencana program, kegiatan dan subkegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								10.569.776.600,00	11.667.458.020,00	11.494.098.184,00	924.321.584,00						9.194.818.178,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.569.776.600,00	11.667.458.020,00	11.494.098.184,00	924.321.584,00							9.194.818.178,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							10.269.776.600,00	11.367.458.020,00	11.274.423.184,00	1.004.646.584,00							8.697.818.178,00	
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan				100 %	100 %	7.817.976.600,00	8.615.658.020,00	8.153.900.479,00	- 895.438.422,00							6.922.538.178,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DAERAH KABUPAT EN/KOTA																		
	2.16.01.2 .01	Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaa n, penganggar an dan laporan kinerja daerah				10 Doku men	16 Doku men	25.338.0 00,00	25.338.0 00,00	25.338.0 00,00	0,00			Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan penyelu dupan.	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is	Masya rakat OPD		26.000.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																smart city				
	2.16.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah				2 Doku men	2 Doku men	5.052.50 0,00	5.052.50 0,00	5.052.50 0,00	5.052.500,0 0	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer		5.000.00 0,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD				2 Doku men	2 Doku men	7.190.50 0,00	7.190.50 0,00	7.190.50 0,00	7.190.500,0 0	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			10.000.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD				3 Doku men	3 Doku men	6.346.00 0,00	6.346.00 0,00	6.346.00 0,00	6.346.000,0 0	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			5.000.00 0,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Lapor an	3 Lapor an	6.749.00 0,00	6.749.00 0,00	6.749.00 0,00	6.749.000,0 0	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer		6.000.00 0,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan				61 Doku men	104 Doku men	5.259.77 6.560,00	5.843.43 8.560,00	5.465.22 1.519,00	205.444.95 9,00			Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan penyelu dupan.	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan	OPD		3.825.81 3.331,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pelaya nan publik berbas is smart city					
	2.16.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Oran g/b ulan	45 Oran g/b ulan	4.817.63 8.000,00	5.401.30 0.000,00	5.133.52 0.959,00	315.882.95 9,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer		3.543.31 9.761,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa n Tugas ASN				25 Doku men	59 Doku men	442.138. 560,00	442.138. 560,00	331.700. 560,00	- 110.438.00 0,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			282.493. 570,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .05	Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaia n perangkat daerah yang terpenuhi				240 Oran g	296 Oran g	506.000. 000,00	720.019. 420,00	703.595. 920,00	197.595.92 0,00			Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan penyelu dupan.	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan	OPD		643.957. 800,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa n				70 Paket	140 Paket	21.000.0 00,00	21.000.0 00,00	60.000.0 00,00	39.000.000, 00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			35.000.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				70 Oran g	56 Oran g	185.000. 000,00	185.000. 000,00	129.576. 500,00	- 55.423.500, 00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer		238.957. 800,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				100 Oran g	100 Oran g	300.000. 000,00	514.019. 420,00	514.019. 420,00	214.019.42 0,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DBH CUKAI HASIL TEMBA KAU (CHT)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer		370.000. 000,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi				22 Paket	93 Paket	197.532. 000,00	197.532. 000,00	153.436. 500,00	- 44.095.500, 00			Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan penyelu dupan.	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan	OPD		167.079. 227,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.995.0 00,00	14.995.0 00,00	15.251.0 00,00	256.000,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi.	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata			15.000.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															dan penyelu dupan.	kelola pemer ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				6 Paket	8 Paket	25.526.5 00,00	25.526.5 00,00	37.310.0 00,00	11.783.500, 00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola			25.399.2 27,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	pemer ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	17.366.0 00,00	17.366.0 00,00	17.366.0 00,00	0,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			25.000.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.500.0 00,00	16.500.0 00,00	16.500.0 00,00	0,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			16.500.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Lapor an	6 Lapor an	10.180.0 00,00	10.180.0 00,00	6.800.00 0,00	- 3.380.000,0 0	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			10.180.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Lapor an	60 Lapor an	100.000. 000,00	100.000. 000,00	50.000.0 00,00	- 50.000.000, 00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			50.000.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausah aan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Doku men	1 Doku men	12.964.5 00,00	12.964.5 00,00	10.209.5 00,00	- 2.755.000,0 0	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			25.000.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan				18 unit	59 unit	70.600.0 00,00	70.600.0 00,00	441.731. 600,00	371.131.60 0,00			Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan penyelu dupan.	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan	OPD		829.040. 000,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	181.780. 500,00	181.780.50 0,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer		681.890. 000,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	35 Unit	5.000.00 0,00	5.000.00 0,00	92.051.1 00,00	87.051.100, 00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			17.500.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	20 Unit	65.600.0 00,00	65.600.0 00,00	167.900. 000,00	102.300.00 0,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			81.650.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer		48.000.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia				10 Lapor an	12 Lapor an	1.503.00 0.000,00	1.503.00 0.000,00	1.126.50 0.000,00	- 376.500.00 0,00			Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan penyelu dupan.	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan	OPD		1.181.58 1.620,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pelaya nan publik berbas is smart city					
	2.16.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Lapor an	8 Lapor an	3.000.00 0,00	3.000.00 0,00	4.000.00 0,00	1.000.000,0 0	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer		3.000.00 0,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Lapor an	4 Lapor an	1.500.00 0.000,00	1.500.00 0.000,00	1.122.50 0.000,00	- 377.500.00 0,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			1.178.58 1.620,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .09	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara				82 unit	82 unit	255.730. 040,00	255.730. 040,00	238.076. 940,00	- 17.653.100, 00			Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan penyelu dupan.	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan	OPD		249.066. 200,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																pelayan publik berbasis smart city				
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	78.950.000,00	78.950.000,00	51.999.000,00	- 26.951.000,00	Kab. Demak, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemer			39.950.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a				13 Unit	13 Unit	86.780.0 00,00	86.780.0 00,00	79.366.0 00,00	- 7.414.000,0 0	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			88.000.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	20 Unit	4.482.75 3,00	4.482.75 3,00	5.378.13 8,00	895.385,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			5.000.00 0,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	21.300.0 00,00	21.300.0 00,00	21.300.0 00,00	0,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer		24.950.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si				3 Unit	3 Unit	27.432.5 08,00	27.432.5 08,00	21.292.7 08,00	- 6.139.800,0 0	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			46.166.2 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si				13 Unit	18 Unit	21.950.0 00,00	21.950.0 00,00	25.000.0 00,00	3.050.000,0 0	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			25.000.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.01.2 .09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si				2 Unit	2 Unit	14.834.7 79,00	14.834.7 79,00	33.741.0 94,00	18.906.315, 00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			20.000.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOL AAN INFORMAS I DAN KOMUNIKA SI PUBLIK	Nilai Keterbukaa n Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah				98,65 Angk a	96 Angk a	2.025.90 0.000,00	2.025.90 0.000,00	2.248.17 4.000,00	- 1.485.780.0 00,00							540.120. 000,00	
	2.16.02.2 .01	Pengelolaa n Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola				5 Laya nan	5 Laya nan	2.025.90 0.000,00	2.025.90 0.000,00	2.248.17 4.000,00	222.274.00 0,00			Mempe rkokoh ideologi Pancasi la, demokr asi, dan hak asasi manusi a (HAM).	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city	Masya rakat dan OPD		540.120. 000,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.02.2 .01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendisemin asikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				2 Komu nitas	2 Komu nitas	431.220. 000,00	1.031.22 0.000,00	1.018.82 0.000,00	587.600.00 0,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkokoh ideologi Pancasi la, demokr asi, dan hak asasi manusi a (HAM).	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2.			150.000. 000,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.02.2 .01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohona n Informasi Publik yang diselesaika n sesuai peraturan perundanga n				3 Perm oho nan	3 Perm oho nan	343.490. 000,00	143.490. 000,00	138.285. 600,00	- 205.204.40 0,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkokoh ideologi Pancasi la, demokr asi, dan hak asasi manusi a (HAM).	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening			70.120.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																katan tata kelola pemer ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.02.2 .01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				25 Perse ntase	25 Perse ntase	436.030. 000,00	36.030.0 00,00	30.717.5 00,00	- 405.312.50 0,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkokoh ideologi Pancasi la, demokr asi, dan hak asasi manusi a (HAM).	2. Pening katan tata kelola pemer ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan			70.000.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.02.2 .01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaata n media berbayar sesuai kriteria/jukni s				4 Medi a	4 Medi a	815.160. 000,00	815.160. 000,00	1.060.35 0.900,00	245.190.90 0,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkokoh ideologi Pancasi la, demokr asi, dan hak asasi manusi a (HAM).	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata			250.000. 000,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																kelola pemer ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
3 ,	2.16.03	PROGRAM PENGELOL AAN APLIKASI INFORMAT IKA	persentase aplikasi e- gov yang terintegrasi dengan portal daerah				69,04 %	69,04 %	425.900. 000,00	725.900. 000,00	872.348. 705,00	809.260.00 0,00							1.235.16 0.000,00	
	2.16.03.2 .02	Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi				2 Unit	2 Unit	425.900. 000,00	725.900. 000,00	872.348. 705,00	446.448.70 5,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pember	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Masyarakat dan OPD		1.235.16 0.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															antasan korupsi, narkoba , judi, dan penyelu dupan.	2. Pening katan tata kelola pemerin ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.03.2 .02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	135.978.000,00	135.978.000,00	35.290.000,00	- 100.688.000,00	Kab. Demak, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan	2. Pening katan tata kelola pemerin ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city			140.000.000,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															korupsi, narkoba , judi, dan penyelu dupan.	Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.03.2 .02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				2 Doku men	2 Doku men	40.000.0 00,00	40.000.0 00,00	23.650.0 00,00	- 16.350.000, 00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi,	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening			43.000.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															narkoba , judi, dan penyelu dupan.	katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.03.2 .02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangk an sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				40 Aplik asi	32 Aplik asi	85.040.0 00,00	385.040. 000,00	563.400. 000,00	478.360.00 0,00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan			200.316. 000,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															, judi, dan penyelu dupan.	tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.03.2 .02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				1 Unit	1 Unit	100.000. 000,00	100.000. 000,00	191.713. 705,00	91.713.705, 00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi.	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata			500.000. 000,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															dan penyelu dupan.	kelola pemer ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.03.2 .02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelengg araan Audit TIK sesuai kewenanga n Dinas Kominfo				4 Doku men	1 Doku men	15.060.0 00,00	15.060.0 00,00	10.120.0 00,00	- 4.940.000,0 0	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola			206.844. 000,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	pemer ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.16.03.2 .02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah implementa si Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/ Kota Cerdas				1 Progr am	1 Progr am	49.822.0 00,00	49.822.0 00,00	48.175.0 00,00	- 1.647.000,0 0	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Mempe rkuat reforma si politik, hukum dan birokras i, serta mempe rkuat penceg ahan dan pember antasan korupsi, narkoba , judi, dan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer			145.000. 000,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penyelu dupan.	ntahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.20	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG STATISTIK							142.130. 000,00	142.130. 000,00	128.440. 000,00	- 13.690.000, 00							230.225. 000,00	
1 ,	2.20.02	PROGRAM PENYELEN GGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat Ketersedia an sistem data dan statistik yang terintegrasi				100 %	100 %	142.130. 000,00	142.130. 000,00	128.440. 000,00	88.095.000, 00							230.225. 000,00	
	2.20.02.2 .01	Penyelengg araan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata				1400 Data	1400 Data	142.130. 000,00	142.130. 000,00	128.440. 000,00	- 13.690.000, 00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertum buhan ekonom i,	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik	Masya rakat dan OPD		230.225. 000,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pemera taan ekonom i dan pember antasan kemiski nan.	berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.20.02.2 .01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatk an pelatihan di bidang statistik				27 Oran g	27 Oran g	72.300.0 00,00	72.300.0 00,00	66.700.0 00,00	- 5.600.000,0 0	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertum buhan ekonom i, pemera	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas			53.573.5 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															taan ekonom i dan pember antasan kemiski nan.	is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city				
	2.20.02.2 .01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				1500 Data	1500 Data	37.970.0 00,00	37.970.0 00,00	22.210.0 00,00	- 15.760.000, 00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertum buhan ekonom i, pemera taan	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is		142.891. 500,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1400 Dokumen	1400 Dokumen	31.860.000,00	31.860.000,00	39.530.000,00	7.670.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membanngun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart			33.760.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															i dan pember antasan kemiskinan.	city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							157.870.000,00	157.870.000,00	91.235.000,00	66.635.000,00							266.775.000,00	
1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah				87,5 %	87,5 %	157.870.000,00	157.870.000,00	91.235.000,00	108.905.000,00							266.775.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.21.02.2 .01	Penyeleng araan Persandian untuk Pengamana n Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyelengg araan persandian untuk pengamana n informasi pemerintah daerah				1 Lapor an	1 Lapor an	157.870. 000,00	157.870. 000,00	91.235.0 00,00	- 66.635.000, 00			Memant apkan sistem perta han keaman an negara dan mendor ong kemand irian bangsa melalui swase mbada pangan, energi, air, ekonom i kreatif, ekonom i hijau, dan ekonom i biru	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city	Masya rakat Masya rakat dan OPD	266.775. 000,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA	
	2.21.02.2 .01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaa n Keamanan Informasi Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Lapor an	1 Lapor an	99.230.0 00,00	99.230.0 00,00	58.704.0 00,00	58.704.000, 00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memant apkan sistem perta han keaman an negara dan mend ong kemand irian bangsa melalui swase mbada pangan, energi, air, ekonom i kreatif, ekonom i hijau, dan ekonom i biru	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city		188.385. 000,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA	
	2.21.02.2 .01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunak an Layanan Keamanan Informasi				41 Pera ngkat Daer ah	41 Pera ngkat Daer ah	58.640.0 00,00	58.640.0 00,00	32.531.0 00,00	32.531.000, 00	Kab. Dema k, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memant apkan sistem perta han keaman an negara dan mend ong kemand irian bangsa melalui swase mbada pangan, energi, air, ekonom i kreatif, ekonom i hijau, dan ekonom i biru	2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city 2. Pening katan tata kelola pemer intahan dan pelaya nan publik berbas is smart city		78.390.0 00,00	DINAS KOMUN IKASI DAN INFOR MATIKA	
	J U M L A H								10.569.7 76.600,0 0	11.667.4 58.020,0 0	11.494.0 98.184,0 0	924.321.58 4,00						9.194.81 8.178,00		

Dalam rangka aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Demak menargetkan prevalensi stunting tahun 2025 sebesar 7,5%. Agar pelaksanaan aksi konvergensi berhasil dan berdaya guna, Dinkominfo mendukung pelaksanaan aksi tersebut dengan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Rancangan Renja
	2 16.02	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7.430.000
	2 16.02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.430.000
	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	7.430.000
		JUMLH	7.430.000

Dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanganan penurunan stunting di Kabupaten Demak melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik focus di media cetak luar ruang untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak (Cetak MMT) dipasang pada 17 lokus wilayah kelompok rentan stunting yang tersebar tersebar di 7 Kecamatan (Kec. Guntur 1 lokus, Kec. Bonang 3 lokus, Kec. Demak 3 lokus, Kec. Mranggen 3 lokus, Kec. Sayung 4 lokus, Kec. Dempet 1 lokus, Kec. Gajah 1 lokus dan Kecamatan Wonosalam 1 lokus).

4.2 Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 melaksanakan Rencana Program dan kegiatan prioritas mengacu pada program prioritas Bupati Demak Tahun 2025 sbb :

1. Prioritas program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis “SMART CITY”, dengan indikator

program integrasi aplikasi e-government dan Pengembangan Single Database (Kebijakan Satu Data) menjadi leading sektor Dinas Komunikasi dan Informatika sedangkan yang sifatnya supporting kegiatan adalah kegiatan Papperless Office (Administrasi Kantor Hemat Kertas) dan Digitalisasi Desa, support jaringan pada Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), serta support jaringan pada kegiatan Mall Pelayanan Publik (MPP).

2. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika mensupport jaringan dan mendukung keberhasilan pada indikator Literasi Berbasis Inklusi Social, pembangunan taman-taman Baca Integrative dan Percepatan Penanganan Stunting.
3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat bersama dengan dinas terkait, Dinas Komunikasi dan Informatika mensupport jaringan dan mendukung kegiatan Pelatihan Start Up Wirausaha Muda.

Adapun program prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis “SMART CITY”, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program prioritas pada Renstra 2021-2026 target 9 Kluster, Tahun 2022 sudah tercapai 4 kluster, sedangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika mentargetkan 3 kluster dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi 5 kluster total pencapaian program integrasi aplikasi e-government Tahun 2023 sebanyak 9 kluster sehingga sudah tercapai 100% maka di Tahun 2024 dan 2025 tidak dianggarkan.
2. Program prioritas Pengembangan Single Database (Kebijakan Satu Data) indikator Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata pada Tahun 2025 dengan target 1400 metadata dengan anggaran Rp230.225.000,00.
3. Dalam upaya perwujudan dan implementasi pencapaian kinerja program prioritas diutamakan untuk pengembangan -pengembangan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis “SMART CITY lebih fokus pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

4. Dalam Pengembangan program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta pihak-pihak terkait baik instansi horisontal maupun vertikal.

Adapun rumusan rencana program prioritas sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2025 sesuai Renstra PD Tahun 2021-2026

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2025 TW 1		TARGET 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Smart City'					270.271.000	800	150.000.000	1.400	230.225.000			
a	Integrasi e-government	Jumlah kluster data yang terintegrasi	Kluster	-	9	100.000.000	-	-	-	-	9	2.16.03.2.02	
1	Integrasi aplikasi kluster Kesehatan	Jumlah Aplikasi dalam kluster kesehatan	Unit	-	1		-	-	-	-	1	2.16.03.2.02.07	
2	Integrasi aplikasi kluster Kondisi Makro	Jumlah Aplikasi dalam kluster ekonomi makro	Unit	-	1		-	-	-	-	1	2.16.03.2.02.07	
3	Integrasi aplikasi kluster Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi dalam kluster keuangan daerah	Unit	-	1		-	-	-	-	1	2.16.03.2.02.07	
4	Integrasi aplikasi kluster Kesejahteraan	Jumlah Aplikasi dalam kluster kesejahteraan	Unit	-	1		-	-	-	-	1	2.16.03.2.02.07	
5	Integrasi aplikasi kluster Ekonomi Wilayah	Jumlah Aplikasi dalam kluster ekonomi wilayah	Unit	-	1		-	-	-	-	1	2.16.03.2.02.07	
6	Integrasi aplikasi kluster Pendidikan	Jumlah Aplikasi dalam kluster Pendidikan	Unit	-	1		-	-	-	-	1	2.16.03.2.02.07	
7	Integrasi aplikasi kluster Perumahan	Jumlah Aplikasi dalam kluster Perumahan	Unit	-	1		-	-	-	-	1	2.16.03.2.02.07	
8	Integrasi aplikasi kluster Infrastruktur	Jumlah Aplikasi dalam kluster Infrastruktur	Unit	-	1		-	-	-	-	1	2.16.03.2.02.07	
9	Integrasi aplikasi kluster TIK	Jumlah Aplikasi dalam kluster TIK	Unit	-	1		-	-	-	-	1	2.16.03.2.02.07	
b	Pengembangan single database (kebijakan satu data)	Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata	data	500	n/a	10.800.000	1400	104.160.000	1.000	40.000.000	1.000	2.20.02.2.01	
1	Pengolahan data	Jumlah data dalam metadata yang dianalisis	data	-	1.500	0	1400	31.860.000	1.000	20.000.000	1.000	2.20.02.2.01.01	
2	Pelatihan / Bimtek	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	orang	-	166	0	0	0	0	0	84	2.20.02.2.01.02	

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2025 TW 1		TARGET 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Penyusunan database e sipd	Jumlah database yang disusun	data	-	0	0	0	0	0	0	1	2.20.02.2.01.03	
4	peningkatan kapasitas admin database	Jumlah admin yang dilatih	orang	-	27	10.800.000	27	72.300.000	0	0	41	2.20.02.2.01.04	
5	Pengembangan aplikasi satu database	jumlah aplikasi yang dikembangkan	aplikasi	-	0	0	0	-	1	20.000.000	1	2.20.02.2.01.04	

Selain program prioritas yang mengacu pada Renstra 2021-2026, Renja 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak juga memperhatikan Program Unggulan Bupati periode 2025-2029 :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak mendukung pelaksanaan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati pada program prioritas Demak Smart Governance dan program prioritas delegasi ke kabupaten/kota. Penjelasan pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas Demak Smart Governance

Terdiri dari Kegiatan Prioritas Digitalisasi Birokrasi, Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Administrasi dengan indikator persentase aplikasi layanan publik terintegrasi, Persentase OPD yang menggunakan sistem e-office dan paperless, persentase indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik digital.

Terdiri dari Aksi Prioritas sebagai berikut:

- a. Aksi Prioritas 1, Penguatan Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah dengan indikator jumlah jaringan yang terkoneksi pada di kecamatan (Fiber optic, access point, jaringan distribusi);
- b. Aksi Prioritas 2, Penerapan Aplikasi E-Government dengan indikator jumlah sistem yang terintegrasi dan aktif;
- c. Aksi Prioritas 3, Pelatihan ASN & Admin Digital dengan indikator jumlah perangkat desa yang dilatih administrasi digital, keamanan siber, digital literacy;
- d. Aksi Prioritas 4, Pengembangan Sistem Administrasi Desa (SIADE) dengan indikator persentase penggunaan Aplikasi SIADE diterapkan dan digunakan aktif;
- e. Aksi Prioritas 5, Pengembangan digitalisasi perpustakaan dan kearsipan dengan indikator persentase pengembangan digitalisasi perpustakaan dan kearsipan;
- f. Aksi Prioritas 6, Pengembangan aplikasi SIHIBAN dengan indikator jumlah kegiatan pengembangan aplikasi.

2. Program Prioritas Delegasi ke Kabupaten/Kota, yaitu Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana, dengan dukungan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). Pembentukan satuan tugas pengamanan data digital dan pemasangan jaringan FO, Wi-fi gratis berkapasitas 20 Mbps, bersifat stimulan selama 1 tahun anggaran dan, pelatihan penggunaan secara positif (usaha/bisnis)

Adapun rumusan rencana program prioritas sebagai berikut :

Tabel 4.3.

Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2026 sesuai Program Unggulan Bupati Periode 2025-2029

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)		PROYEKSI 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR 2029		Kode Subkegiatan	Ket.
				Kinerja	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PP Demak Smart Governance												
	KP1. Digitalisasi Birokrasi (Transformasi Digital Pelayanan Publik & Administrasi)	persentase aplikasi layanan publik terintegrasi	%	62,00	20.000.000	70	30.000.000	78,00	35.000.000	94	45.000.000	2.16.03.2.02.0032	
		Persentase OPD yang menggunakan sistem e-office & paperless	%	100	-	100	-	100	-	100	-	-	
		Persentase indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik digital	%	90,33	-	90,37	-	90,39	-	90,43	-	-	
	AP1. Penguatan Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah	jumlah jaringan yang terkoneksi di kecamatan (Fiber optic, access point, jaringan distribusi)	kecamatan	2	-	5	100.000.000	8	110.000.000	12	130.000.000	2.16.03.2.02.0024	
	AP2. Penerapan Aplikasi E-Government	jumlah sistem yang terintegrasi dan aktif	sistem	31	-	35	30.000.000	37	35.000.000	41	45.000.000	2.16.03.2.02.0032	
	AP3. Pelatihan ASN & Admin Digital	jumlah perangkat desa yang dilatih administrasi digital, keamanan siber, digital literacy	orang	50	-	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	2.16.02.2.01.0017	

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)		PROYEKSI 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR 2029		Kode Subkegiatan	Ket.
				Kinerja	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	AP4. Pengembangan Sistem Administrasi Desa (SIADE)	persentase penggunaan Aplikasi SIADE diterapkan dan digunakan aktif	%	91,77	0	93,42	10.000.000	95,06	10.000.000	98,35	10.000.000	2.16.02.2.01.0017	
	AP5 Pengembangan digitalisasi perpustakaan dan kearsipan	persentase pengembangan digitalisasi perpustakaan dan kearsipan	%	0	0	10,00	10.000.000	80,00	150.000.000	95,00	20.000.000	2.16.03.2.02.0032	
	AP6 Pengembangan aplikasi SIHIBAN	jumlah kegiatan pengembangan aplikasi	kegiatan	0	0	0	0	2	40.000.000	2	40.000.000	2.16.03.2.02.0032	
2	PP prioritas Delegasi ke Kabupaten/Kota	Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)	%	91,77	0	93,42	10.000.000	95,06	10.000.000	98,35	10.000.000	2.16.02.2.01.0017	
		Pembentukan satuan tugas pengamanan data digital	satgas	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2.21.02.2.01.0003	
		Pemasangan jaringan FO, Wi-fi gratis berkapasitas 20 Mbps, bersifat stimulan selama 1 tahun anggaran dan, pelatihan penggunaan secara positif (usaha/bisnis)	Desa	0	0	0	0	20	160.000.000	21	168.000.000	2.16.03.2.02.0024	

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tahun 2025 disusun dengan melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tahun 2025 terdapat 5 Program, 11 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. Pagu RKPD murni sebesar Rp10.569.776.600,00 (Sepuluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) APBD Murni sebesar Rp11.667.458.020,00 (Sebelas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah) dan di bulan maret ada efisiensi anggaran perjalanan dinas turun menjadi Rp11.411.877.225,00 (Sebelas miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan pada perubahan Renja naik menjadi Rp11.494.098.184,00 (Sebelas miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah), ada penambahan sebesar Rp924.321.584,00 (Sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dari pagu RKPD murni. Anggaran Perubahan tersebut difokuskan pada :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik untuk pengadaan peralatan streaming dan pemeliharaan peralatan radio.

2. Program pengelolaan aplikasi informatika untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan pengadaan peralatan jaringan, upgrade server dan pemeliharaan peralatan command center.
3. Program penyelenggaraan statistik sektoral untuk pemeliharaan aplikasi satu data demak.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Perubahan Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tahun 2025 merupakan perubahan rencana pada tahun 2025 setelah adanya perubahan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tahun 2025. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak berpedoman pada :

1. Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan I.
3. Usulan program bidang urusan komunikasi dan informasi, bidang urusan statistik dan bidang urusan persandian dalam perumusan kegiatan dalam rancangan Renja guna mengakomodir usulan bidang yang selaras dengan program prioritas.
4. Penyesuaian target indikator Kinerja Daerah yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, target indikator kegiatan dan target indikator sub kegiatan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan semester II tahun 2025.

5.3 Rencana tindak lanjut

Guna mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Demak yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan Perencanaan yang bersih, akuntabel, aspiratif, partisipatif, dan transparan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan untuk:

1. Bekerja keras serta berbenah diri, meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal;
2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi;
3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi;
4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan dan
5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

LAMPIRAN : 1 BERITA ACARA HASIL PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026
DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSA
5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

**HASIL PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2021-2026
DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN
NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH**

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN	URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	01			Program Penun-jang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupat- en/Kota		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti	%	2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%
							Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan	%	2	16	01					Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	%
2	16	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Doku men	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Doku men

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN	URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN
2	16	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men
2	16	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men
2	16	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku men	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku men
2	16	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Doku men									

SEMULA									MENJADI								
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN	URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN
2	16	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapor an	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapor an
2	16	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kebutuhan administrasi keuangan perangkat Daerah	Oran g	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan	Orang
2	16	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang /bula n	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bula n
2	16	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas AS	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men
2	16	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Oran g/Bua h/K egiat an)	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Orang /Bua h/Keg iatan)
2	16	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket

SEMULA									MENJADI								
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN	URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN
2	16	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
2	16	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang
2	16	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Unit/ dos/ OK	2	16	01	2.06		Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		Jumlah kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Unit/ dos/ OK
2	16	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
2	16	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
2	16	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
2	16	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket

SEMULA									MENJADI								
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN	URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN
2	16	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediaka	Paket
2	16	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
2	16	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	16	01	2.06	0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
2	16	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	16	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
2	16	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah	unit	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang disediakan	unit
2	16	01	207	01	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor perorangan				2	16	01	207	0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor perorangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan yang disediakan	Unit
2	16	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit

SEMULA									MENJADI								
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN	URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN
2	16	01	207	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
2	16	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
2	16	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
2	16	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah	Unit	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	Unit
2	16	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	Laporan
2	16	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
2	16	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang terpelihara	Unit

SEMULA									MENJADI								
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN	URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN
2	16	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
2	16	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
2	16	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
2	16	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
2	16	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN	URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN
2	16	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi	Unit	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi	Unit
2	16	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi	Unit	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi	Unit
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	Angk a	2	16	02			Program Pengel- olaan Informasi dan Komunikasi Publik		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	Angk a
2	16	02	201		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola	Laya nan	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola	Laya nan
2	16	02	201	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Doku men	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis	Media

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN	URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN
2	16	02	201	06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Doku men	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permo honan
2	16	02	201	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Doku men	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persent ase
2	16	02	201	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Doku men	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Meningkatnya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komun itas
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah	%	2	16	3			Program Pengel-olaan Aplikasi Informatika		Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah	%
2	16	03	201		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	OPD									

SEMULA									MENJADI								
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN	URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN
2	16	03	202		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi	Unit	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi	Unit
2	16	03	202	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Doku men	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Terfaasilitasinya penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Lapor an
2	16	03	202	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Doku men	2	16	03	2.02	0018	Koordinasi penyusunan dan/ atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Tersusunnya reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Doku men
2	16	03	201	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	2	16	03	2.01	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/ Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit
2	16	03	202	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Terlaksananya Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/ atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Unit

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN	URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN
2	16	03	202	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Doku men	2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Terfasilitasinya penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Doku men
2	16	03	202	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Doku men	2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/ Kota Cerdas	Progr am
2	16	03	202		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Doku men									
2	16	03	202	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layan an									
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	%	2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	%

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN	URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN
2	20	02	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata	Data	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata	Data
2	20	02	201	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	2	20	02	2.01	.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang
2	20	02	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Doku men	2	20	02	2.01	.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Doku men
2	20	02	201	03 0	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Doku men	2	20	02	2.01	.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Terselenggaranya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Metad ata
2	20	02	201	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang									
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												

SEMULA								MENJADI									
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN	URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Tingkat keamanan informasi pemerintah	%
2	21	02	201		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Lapor an	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Lapor an
2	21	02	201	02	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Doku men									
2	21	02	201	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Lapor an	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Lapor an
2	21	02	201	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Peran gkat Daera h	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Peran gkat Daera h

